

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

Tujuan dari studi ini adalah untuk menyelidiki dampak dari kesenjangan pendapatan, Indeks Pembangunan Manusia, dan laju pertumbuhan ekonomi terhadap angka kemiskinan di daerah Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban selama tahun 2012 sampai 2021. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data waktu yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, Kabupaten Bojonegoro, dan Kabupaten Tuban.

4.1.1 Ketimpangan Pendapatan

Tabel 4. 1 Ketimpangan Pendapatan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban 2012 - 2021

Tahun	Kabupaten Bojonegoro		Kabupaten Tuban	
	Indeks Gini %	Perkembangan %	Indeks Gini %	Perkembangan %
2012	0,31	-	0,27	-
2013	0,32	0,01	0,30	0,03
2014	0,28	-0,04	0,24	-0,06
2015	0,32	0,04	0,29	0,05
2016	0,32	0,00	0,33	0,04
2017	0,29	-0,03	0,31	-0,02
2018	0,35	0,06	0,36	0,05
2019	0,31	-0,04	0,30	-0,06
2020	0,30	-0,01	0,34	0,04
2021	0,34	0,04	0,35	0,01

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (Data Diolah)

Tabel data Indeks Gini Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban periode 2012–2021, ketimpangan pendapatan di kedua wilayah sama-sama bersifat

fluktuatif, namun dengan dinamika yang sedikit berbeda. Bojonegoro menunjukkan pola naik turun yang cukup tajam, mencerminkan kondisi ketimpangan yang belum stabil, di mana penurunan pada beberapa tahun sering diikuti oleh kenaikan relatif pada tahun berikutnya, hingga akhirnya mencapai 0,34 pada 2021.

Kabupaten Tuban cenderung mengalami tren peningkatan ketimpangan yang lebih konsisten, terutama sejak 2016, meskipun sempat menurun pada 2014, 2017, dan 2019. Pada periode akhir pengamatan, Indeks Gini Tuban berada pada level yang sedikit lebih tinggi dibanding Bojonegoro, menandakan bahwa distribusi pendapatan di Tuban relatif lebih timpang. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan bahwa proses pembangunan di kedua kabupaten belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan hasil pembangunan akibatnya, manfaat dari pertumbuhan ekonomi belum dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.

4.1.2 Indeks Pembangunan Manusia

Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban selama periode 2012–2021 menunjukkan adanya peningkatan kualitas pembangunan manusia yang relatif konsisten di kedua daerah. Bojonegoro secara umum memiliki nilai IPM yang sedikit lebih tinggi dibandingkan Tuban pada hampir seluruh tahun pengamatan, dengan laju pertumbuhan yang cukup stabil dan peningkatan yang paling menonjol terjadi pada 2015 dan 2019. Kabupaten Tuban juga mengalami tren kenaikan IPM yang positif, bahkan pada beberapa tahun menunjukkan perkembangan yang lebih cepat dibanding Bojonegoro, meskipun sempat melambat tajam pada 2020 akibat tekanan dari keadaan sosial-ekonomi. Secara keseluruhan, informasi ini menunjukkan bahwa usaha untuk

memperbaiki taraf kehidupan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan kondisi hidup yang memadai masih terus berlanjut di dua wilayah tersebut, namun capaian yang relatif lebih tinggi di Bojonegoro mengindikasikan bahwa hasil pembangunan manusia di daerah ini masih sedikit lebih maju dibandingkan Kabupaten Tuban.

Tabel 4. 2 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro 2012 – 2021

Tahun	Kabupaten Bojonegoro		Kabupaten Tuban	
	Indeks Pembangunan Manusia	Perkembangan %	Indeks Pembangunan Manusia	Perkembangan %
2012	64,20	-	63,36	-
2013	64,85	0,65	64,14	0,78
2014	65,27	0,42	64,58	0,44
2015	66,17	0,90	65,52	0,94
2016	66,73	0,56	66,19	0,67
2017	67,28	0,55	66,77	0,58
2018	67,85	0,57	67,43	0,66
2019	68,75	0,90	68,37	0,94
2020	69,04	0,29	68,4	0,03
2021	69,59	0,55	68,91	0,51

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (Data Diolah)

4.1.3 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bojonegoro serta Kabupaten Tuban periode 2012–2021, terlihat perbedaan karakter pertumbuhan yang cukup kontras di antara keduanya. Bojonegoro menunjukkan pola pertumbuhan yang sangat fluktuatif, dengan lonjakan ekstrem pada 2015 dan 2016 yang mencerminkan kuatnya pengaruh sektor unggulan tertentu, namun tidak berkelanjutan karena setelahnya pertumbuhan kembali melemah hingga mengalami kontraksi cukup dalam pada 2020 dan 2021. Kondisi ini menggambarkan bahwa struktur ekonomi Bojonegoro relatif rentan terhadap guncangan dan perubahan

kondisi eksternal. Berikut data tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban

Tabel 4. 3 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban 2012 - 2021

Tahun	Kabupaten Bojonegoro		Kabupaten Tuban	
	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi %	Perkembangan %	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi %	Perkembangan %
2012	3,77	-	6,29	-
2013	2,37	-1,40	5,85	-0,44
2014	2,29	-0,08	5,47	-0,38
2015	17,42	15,13	4,89	-0,58
2016	21,95	4,53	4,90	0,01
2017	10,25	-11,7	4,98	0,08
2018	4,39	-5,86	5,15	0,17
2019	6,34	1,95	5,14	-0,01
2020	-0,40	-6,74	-5,85	-10,99
2021	-5,54	-5,14	3,00	8,85

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur 2012 - 2021

Kabupaten Tuban menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang lebih teratur dan seimbang selama masa pengamatan, meskipun tetap terdampak cukup signifikan pada 2020 akibat tekanan ekonomi global. Pemulihan Tuban pada 2021 yang kembali ke zona positif menunjukkan daya tahan ekonomi yang lebih baik. Secara keseluruhan, data ini menegaskan bahwa stabilitas pertumbuhan ekonomi menjadi tantangan utama bagi Bojonegoro, sementara Tuban sedang berusaha untuk mengatasi masalah mengenai cara mempertahankan pertumbuhan yang konsisten agar manfaatnya dapat dirasakan dengan lebih adil oleh seluruh masyarakat.

4.1.4 Tingkat Kemiskinan

Tabel 4. 4 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban 2012 - 2021

Tahun	Kabupaten Bojonegoro		Kabupaten Tuban	
	Tingkat Kemiskinan %	Perkembangan %	Tingkat Kemiskinan %	Perkembangan %
2012	16,66	-	17,84	-
2013	16,02	-0,64	17,23	-0,61
2014	15,48	-0,54	16,64	-0,59
2015	15,71	0,23	17,08	0,44
2016	14,6	-1,11	17,14	0,06
2017	14,34	-0,26	16,87	-0,27
2018	13,16	-1,18	15,31	-1,56
2019	12,38	-0,78	14,58	-0,73
2020	12,87	0,49	15,91	1,33
2021	13,27	0,40	16,31	0,40

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur 2012 - 2021

Berdasarkan table 4.4, kemiskinan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban selama periode 2012 – 2021 menunjukkan kecenderungan penurunan kemiskinan dalam jangka panjang, meskipun tidak berjalan secara sempurna. Kabupaten Bojonegoro mengalami penurunan tingkat kemiskinan yang relatif lebih konsisten hingga mencapai titik terendah pada tahun 2019, hal ini mencerminkan adanya perbaikan kesejahteraan masyarakat, namun kondisi ini kembali memburuk pada 2020 dan 2021 seiring tekanan ekonomi dan pandemi COVID-19 yang memperlemah daya beli dan kesempatan kerja.

Kabupaten Tuban memiliki tingkat kemiskinan yang cenderung lebih tinggi dibanding Bojonegoro sepanjang periode pengamatan, dengan penurunan yang cukup signifikan hingga 2019, tetapi mengalami kenaikan tajam pada 2020 dan masih berlanjut pada 2021. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan bahwa

kemiskinan di kedua daerah sangat sensitif terhadap guncangan ekonomi, oleh karena itu, upaya untuk menanggulangi kemiskinan tidak dapat hanya terarah pada pertumbuhan ekonomi, melainkan perlu adanya dukungan dari perlindungan sosial dan kebijakan yang bisa memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat.

4.2 Hasil Pengujian Kabupaten Bojonegoro

4.2.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil

Tabel 4. 5 Hasil Uji Regresi Linier Berganda Kab. Bojonegoro

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	64,977	7,348		8,843	0,000
Ketimpangan Pendapatan	3,589	9,919	0,050	0,362	0,730
Indeks Pembangunan Manusia	-0,771	0,114	-0,962	-6,762	0,001
Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	0,000	0,024	-0,002	-0,015	0,989

Sumber: Lampiran

Hasil analisis dengan model OLS menghasilkan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

Tingkat Kemiskinan = 64,977 + 3,589 Ketimpangan Pendapatan – 0,771 Indeks Pembangunan Manusia + 0,000

Persamaan regresi linear berganda diatas dapat ditafsirkan dengan penjelasan berikut:

1. α = Konstanta = 64,977

Nilai Konstanta 64,977 memiliki arti jika Ketimpangan Pendapatan, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi tetap tidak berubah, maka Tingkat Kemiskinan bernilai 64,977

2. $B_1 = \text{Koefisien Regresi Ketimpangan Pendapatan} = 3,589$

Menurut nilai koefisiensi regresi dengan variabel Ketimpangan Pendapatan, Ketimpangan Pendapatan berkorelasi positif dengan Tingkat Kemiskinan, yaitu untuk setiap kenaikan satu persen dalam Tingkat Kemiskinan, Ketimpangan Pendapatan akan bertambah sebesar 3,589

3. $B_2 = \text{Koefisien Regresi Indeks Pembangunan Manusia} = -0,771$

Menurut nilai koefisiensi regresi dengan variabel Indeks Pembangunan Manusia, IPM memiliki hubungan negatif dengan Tingkat Kemiskinan, di mana setiap peningkatan satu persen dalam Tingkat Kemiskinan akan menurunkan indeks pembangunan manusia sebesar 0,771.

4. $B_3 = \text{Koefisien Regresi Tingkat Pertumbuhan Ekonomi} = 0,000$

Menurut nilai koefisiensi regresi dengan variabel Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, TPE memiliki hubungan positif dengan Tingkat Kemiskinan, di mana setiap peningkatan satu persen dalam Tingkat Kemiskinan akan meningkatkan sebesar 0,000.

4.2.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana model mampu menjelaskan pergeseran pada variabel yang bergantung. Angka R^2 berada dalam rentang 0 sampai 1, di mana nilai yang rendah menandakan bahwa variabel independen kurang efisien dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen.

Tabel 4. 6 Hasil Uji Koefisiensi Determinasi (R^2) Kab. Bojonegoro

R	R Square
0,947	0,897

Sumber: Lampiran

Tabel 4. 6 menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) adalah 0,897. Hasil ini menunjukkan bahwa sekitar 89,7% variasi dalam tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan kata lain, sebagian besar perubahan pada tingkat kemiskinan disebabkan oleh faktor-faktor yang telah dianalisis, sementara sisa yang mencapai 10,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model yang diteliti.

4.2.3 Hasil Uji Asumsi Klasik (BLUE)

Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk memastikan bahwa model regresi yang diperoleh memiliki akurasi yang tinggi, dapat diandalkan, tidak memiliki kecenderungan bias, serta konsisten dalam menjelaskan hubungan antara variabel (Ghozali, 2016). Sebuah model regresi linier dianggap baik dan dapat dipercaya jika memenuhi asumsi klasik, seperti distribusi normal pada residual dan tidak terdapat masalah multikolinearitas, autokorelasi, serta heteroskedastisitas.

4.2.3.1 Uji Normalitas

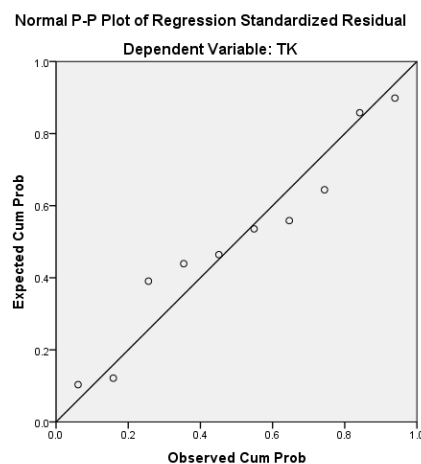
Uji normalitas dalam analisis regresi dilakukan untuk memastikan apakah sisa dari hasil regresi mengikuti distribusi normal. Umumnya, model regresi yang efektif ditandai dengan sisa yang terdistribusi secara normal, sehingga hasil yang diperoleh lebih dapat diandalkan.

Tabel 4. 7 Hasil Uji Normalitas Kab. Bojonegoro

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
	Unstandardized Residual
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,200

Sumber: Lampiran

Residual dianggap berdistribusi normal jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, yang menandakan bahwa data tidak mengalami deviasi secara signifikan dari distribusi normal. Nilai signifikansi pada tabel 4.7, adalah 0,200 berdasarkan uji Kolmogorov Smirnov. Nilai ini $> 0,05$ yang mengindikasikan variabel independen dan dependen terdistribusi secara teratur.



Gambar 4. 1 Hasil Grafik Normal P-P (Probability Plot) Kab. Bojonegoro
Sumber: Peneliti (Data Diolah)

4.2.3.2 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas menggambarkan kondisi di mana variabel-variabel independen dalam model regresi memiliki hubungan linear satu sama lain, baik itu sepenuhnya maupun hampir sepenuhnya, yang terlihat dari nilai koefisien korelasi yang sangat besar.

Tabel 4. 8 Hasil Uji Multikolinearitas Kab. Bojonegoro

	Tolerance	VIF
Ketimpangan Pendapatan	0,900	1,111
Indeks Pembangunan Manusia	0,844	1,186
Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	0,932	1,073

Sumber: Lampiran

Berdasarkan hasil yang ditampilkan dalam Tabel 4.8, nilai VIF untuk X1 (Ketimpangan Pendapatan) sebesar 1,111, X2 (Indeks Pembangunan Manusia) sebesar 1,186, dan X3 (Tingkat Pertumbuhan Ekonomi) sebesar 1,073. Karena semua nilai VIF tersebut di bawah 10, bisa disimpulkan bahwa tidak ada isu multikolinearitas. Nilai Tolerance masing-masing variabel adalah X1 = 0,900, X2 = 0,844, dan X3 = 0,932, yang semuanya masih <1. Dengan demikian, model regresi yang diterapkan dapat dinyatakan tidak memiliki isu multikolinearitas.

4.2.3.3 Uji Autokorelasi

Autokorelasi mengindikasikan adanya relasi atau keterhubungan antara satu pengamatan dan pengamatan lain yang teratur berdasarkan waktu atau tempat. Untuk memeriksa autokorelasi, kita menggunakan uji Durbin–Watson (DW). Berikut adalah hasil dari uji Durbin-Watson (DW) yang bertujuan untuk mengetahui apakah autokorelasi itu ada atau tidak:

1. Nilai Durbin-Watson = 1,523
2. Jumlah Variabel Bebas (k) = 3
3. Jumlah Sampel (n) = 10
4. Taraf Signifikasi = 0,05
5. $dL = 0,5253$; $dU = 2,0163$; $4-dU = 1,9837$

Tabel 4. 9 Hasil Uji Autokorelasi Kab. Bojonegoro

Durbin Watson	Hasil Pengujian	Keterangan
1,523	$dL < \text{Durbin-Watson} < dU$ $0,5253 < 1,523 < 2,0163$	Tidak Ada Kesimpulan

Sumber: Lampiran

Dari hasil uji yang dilakukan nilai dari Durbin-Watson (DW) yaitu sebesar 1,523. Hasil dapat dikatakan tidak ada kesimpulan, artinya autokorelasi itu terjadi atau tidak. Uji autokorelasi hasilnya tidak dapat disimpulkan, maka menggunakan uji runs test untuk mengetahui terjadi autokorelasi atau tidak.

Tabel 4. 10 Hasil Uji Runs Test Kab. Bojonegoro

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,737

Sumber: Lampiran

Pada hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai asymptotic significant, yaitu uji runs test sebesar 0,737 ($> 0,05$) dikatakan tidak terdapat autokorelasi.

4.2.3.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menilai apakah terdapat perbedaan dalam varians residual di antara observasi pada model regresi, karena perbedaan ini dapat mengganggu ketepatan hasil estimasi (Juliandi et al., 2014). Pengujian ini penting dilakukan agar model regresi mampu menghasilkan estimasi stabil dan dipercaya. Tidak adanya heteroskedastisitas dapat ditarik kesimpulan jika angka signifikansinya melebihi 0,05 ($>0,05$). Berikut adalah penjelasan mengenai hasil uji heteroskedastisitas dengan memakai uji Glejser:

Tabel 4. 11 Hasil Uji Heteroskedastisitas Kab. Bojonegoro

	Sig.
Ketimpangan Pendapatan	0,179
Indeks Pembangunan Manusia	0,271
Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	0,998

Sumber: Lampiran

Berdasarkan Tabel 4. 11, angka signifikan yang didapatkan lebih dari 0,05, sehingga bisa disimpulkan bahwa model penelitian tidak menunjukkan indikasi heteroskedastisitas. Temuan ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara nilai residual dengan variabel-variabel yang diuji. Persamaan regresi yang diterapkan telah memenuhi syarat-syarat klasik, sehingga dapat digunakan untuk analisis berikutnya.

4.2.4 Hasil Uji Hipotesis

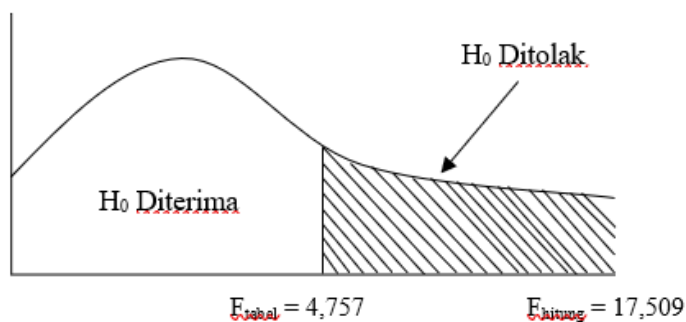
4.2.4.1 Uji F

Tabel 4. 12 Hasil Uji F Kab. Bojonegoro

F Statistic	17,509
Sig	0,002

Sumber: Lampiran

Berdasarkan analisis pada Tabel 4.12, nilai F yang didapatkan adalah 17,509 dengan level signifikansi 0,002. Ketika dibandingkan dengan F tabel yang bernilai 4,757, yang dihitung berdasarkan $df_1 = 3$ (jumlah variabel X) dan $df_2 = 10$ ($n-k-1$ atau $10-3-1$), dapat dilihat bahwa F yang dihitung lebih tinggi daripada F tabel. Nilai signifikansi sebesar 0,002. (<0.05) maka bisa dikatakan bahwa variabel independent berpengaruh signifikan secara simultan dengan variabel dependen. Kurva distribusi F Kabupaten Bojonegoro ditampilkan di bawah ini:



Gambar 4. 2 Kurva Distribusi F Kabupaten Bojonegoro

4.2.4.2 Uji T

Uji t digunakan untuk menguji hipotesis penelitian dengan menganalisis dampak dari setiap variabel independen secara individual, apakah mereka benar-benar berpengaruh pada variabel dependen. Selain itu, uji t juga berfungsi untuk membuktikan kebenaran hipotesis dengan melihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara dua rata-rata sampel yang diambil secara acak dari populasi yang sama (Sudjiono, 2010).

Tabel 4. 13 Hasil Uji T Kab. Bojonegoro

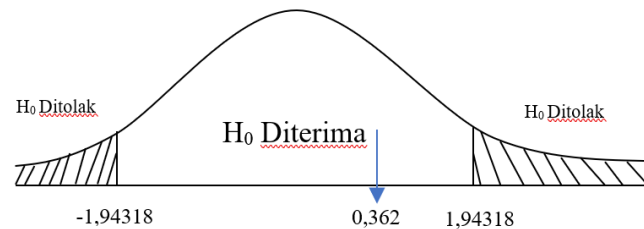
Model	T	Sig.
Ketimpangan Pendapatan	0,362	0,730
Indeks Pembangunan Manusia	-6,762	0,001
Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	-0,015	0,989

Sumber: Lampiran

a. Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan pemeriksaan uji t, ditemukan nilai t yang menunjukkan ketimpangan pendapatan sebesar 0,362. Di sisi lain, nilai t pada tabel pada tingkat signifikansi ($\alpha/2 = 0,05$) dengan derajat kebebasan (df) yang dihitung adalah $(10-3-1) = 6$, yaitu 1,94318. Mengingat bahwa thitung (0,362) lebih kecil dibandingkan t tabel (1,94318), maka H_0 dapat diterima dan H_1 ditolak. Selain

itu, nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,730 ($> 0,05$). Kurva distribusi t untuk ketimpangan pendapatan di Kabupaten Bojonegoro ditampilkan di bawah ini.:

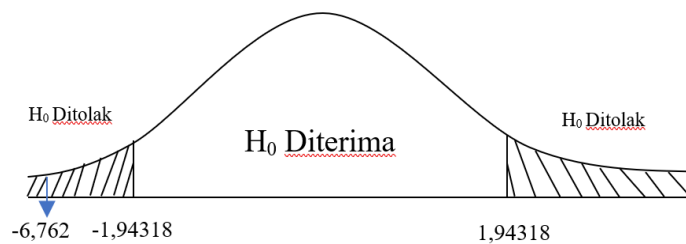


Gambar 4.3 Kurva Distribusi Uji t Ketimpangan Pendapatan (X1) Kabupaten Bojonegoro

Karena kurva distribusi t menunjukkan bahwa nilai tersebut berada di area penerimaan H_0 , maka bisa dikatakan bahwa variabel Ketimpangan Pendapatan (X1) tidak memiliki pengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro secara parsial.

b. Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil analisis uji t, nilai t yang diperoleh untuk indeks pembangunan manusia mencapai -6,762. Sebaliknya, nilai t tabel pada tingkat signifikansi ($\alpha/2 = 0,05$) dengan derajat kebebasan (df) sebesar $(10-3-1) = 6$ adalah 1,94318. Karena nilai t hitung (-6,762) lebih besar dari t tabel (1,94318), kita dapat menyimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Selain itu, nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,001, yang lebih kecil dari 0,05. Grafis distribusi t untuk ketimpangan pendapatan di Kabupaten Bojonegoro ditampilkan di bawah ini:

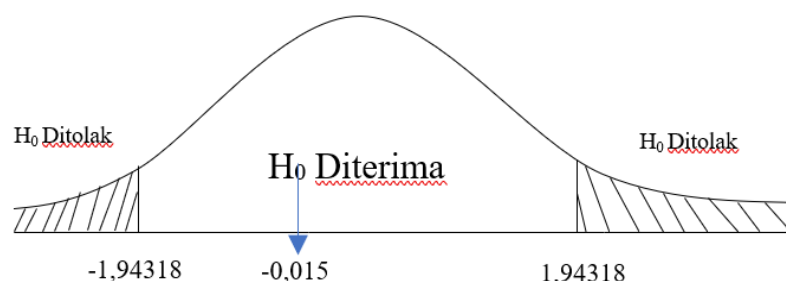


Gambar 4. 4 Kurva Distribusi Uji t Indeks Pembangunan Manusia (X2) Kab. Bojonegara

Karena kurva distribusi t menunjukkan bahwa nilai tersebut berada di area penolakan H_0 , maka dapat disimpulkan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia (X2) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bojonegara secara parsial.

c. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil analisis uji t, nilai t yang diperoleh untuk pertumbuhan ekonomi adalah -0,015. Sebaliknya, nilai t pada tabel untuk tingkat signifikansi ($\alpha/2 = 0,05$) dengan derajat kebebasan (df) yang dihitung sebagai $(10-3-1) = 6$ adalah 1,94318. Mengingat t yang dihitung (0,362) berada di bawah t tabel (1,94318), maka kita bisa menyimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak. Selain itu, nilai signifikansi yang ditemukan adalah 0,989, yang lebih tinggi dari 0,05. Kurva distribusi t untuk tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bojonegara terlihat di bawah ini.:



Gambar 4. 5 Kurva Distribusi Uji t Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (X3) Kab. Bojonegara

Karena kurva distribusi t menunjukkan bahwa nilai tersebut berada di area penerimaan H_0 , maka bisa dikatakan variabel Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (X3) tidak memiliki pengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro secara parsial.

4.2.5 Pembahasan

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, dan pertumbuhan ekonomi saling berinteraksi mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro selama periode 2012 hingga 2021. Di samping itu, uji t secara individual mengindikasikan bahwa masing-masing variabel independen memberikan efek yang berbeda dan signifikan terhadap variabel dependen.

4.2.5.1 Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro

Sesuai dengan analisis uji t yang dilakukan, nilai t yang diperoleh adalah 0,362, yang lebih kecil daripada nilai t tabel yang tercatat 2,20099 dengan level signifikansi 0,730 yang lebih besar dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa Ketimpangan Pendapatan (X1) tidak berpengaruh pada Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perubahan pada ketimpangan pendapatan tidak diikuti oleh perubahan pada tingkat kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro. Tinggi atau rendahnya ketimpangan pendapatan tidak secara langsung membuat tingkat kemiskinan meningkat ataupun menurun secara signifikan. Hubungan keduanya dalam penelitian ini tidak menunjukkan pengaruh yang nyata secara parsial. Ketika ketimpangan pendapatan meningkat, tingkat kemiskinan tidak serta-merta ikut meningkat, begitu pula sebaliknya. Keadaan ini

menggambarkan bahwa pergeseran kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro kemungkinan besar lebih dipengaruhi oleh elemen-elemen lain di luar masalah ketimpangan pendapatan, seperti kesempatan kerja, kualitas pendidikan, akses terhadap layanan dasar, atau pertumbuhan sektor ekonomi tertentu. Secara lebih luas, temuan ini menggambarkan bahwa ketimpangan pendapatan bukanlah satu-satunya penentu kesejahteraan masyarakat.

Hasil tersebut tidak sejalan dengan teori Kuznets, yang berpendapat bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, adanya peningkatan pertumbuhan biasanya diikuti oleh meningkatnya kesenjangan. Kondisi ini dapat menghalangi upaya pengurangan kemiskinan karena manfaat dari pertumbuhan belum dibagikan secara merata. Artinya ada hubungan antara ketimpangan dan kesejahteraan masyarakat (termasuk kemiskinan), meskipun sifatnya dinamis dan berubah sesuai tahap pembangunan. Dalam hasil uji, ketimpangan justru tidak terbukti memengaruhi kemiskinan secara parsial. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks Kabupaten Bojonegoro, hubungan yang digambarkan oleh Kuznets tidak tampak secara statistik. Jadi, dapat dikatakan bahwa temuan ini tidak sepenuhnya mendukung teori Kuznets, atau daerah tersebut kemungkinan berada dalam kondisi tertentu, di mana faktor lain lebih berperan dalam menentukan tingkat kemiskinan dibandingkan ketimpangan pendapatan.

Hasil dari studi ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dianti et al., 2024) yang menunjukkan bahwa variabel ketidakmerataan pendapatan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Ini menunjukkan bahwa penyebaran pendapatan belum berjalan dengan baik dan masih ada ketidakseimbangan di daerah-daerah yang belum sepenuhnya mendapatkan pembangunan.

4.2.5.2 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro

Berdasarkan analisis menggunakan uji t, nilai t yang diperoleh adalah -6,762, yang melebihi nilai t yang ada dalam tabel yaitu 2,20099 dengan tingkat signifikan sebesar $0,001 < 0,05$. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (X2) memiliki dampak negatif yang signifikan, sebesar 0,771%, terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro. Ketika nilai IPM meningkat, maka tingkat kemiskinan akan semakin menurun, dan sebaliknya. Keterkaitan ini menandakan bahwa kualitas pembangunan manusia sangat berpengaruh dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Secara sederhana, ketika pendidikan membaik, layanan kesehatan lebih terjangkau, dan daya beli masyarakat meningkat yang semuanya tercermin dalam IPM, maka peluang masyarakat untuk keluar dari kemiskinan juga semakin besar. Kelompok masyarakat dengan tingkat kesehatan dan pendidikan yang lebih baik umumnya memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, meningkatkan penghasilan, dan memperbaiki kualitas hidup mereka.

Temuan ini sejalan dengan konsep Modal Manusia yang dikemukakan oleh Mankiw. Mankiw menyatakan bahwa pendidikan, skill, dan pengetahuan sebagai bagian dari modal manusia merupakan elemen penting untuk meningkatkan hasil kerja. Ketika kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat meningkat, kapabilitas seseorang dalam bekerja dan berinovasi juga ikut meningkat. Dampaknya, produktivitas naik, pendapatan bertambah, dan secara bertahap kemiskinan pun menurun. Kabupaten Bojonegoro, dampak buruk dan signifikan dari IPM terhadap kemiskinan menunjukkan bahwa investasi di bidang manusia benar-benar memberikan hasil yang nyata. Ketika masyarakat memiliki bekal

pendidikan yang baik dan kondisi kesehatan yang memadai, mereka lebih mampu menyerap teknologi, beradaptasi dengan perubahan ekonomi, dan menciptakan peluang baru. Pembangunan manusia sebagai fondasi pertumbuhan berkelanjutan di mana peningkatan kualitas manusia menjadi jalan utama untuk mengurangi kemiskinan secara lebih permanen dan merata.

Temuan ini memperlihatkan bahwa kemiskinan bukan persoalan kurangnya penghasilan, tapi juga berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, meningkatkan kualitas kehidupan melalui pendidikan, kesehatan, serta standar kehidupan yang pantas terbukti dapat secara nyata dan signifikan mengurangi angka kemiskinan. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Winata & Musthofa, 2024) yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan terbalik antara IPM dan kemiskinan, di mana peningkatan IPM di Provinsi Jawa Timur biasanya diiringi oleh penurunan tingkat kemiskinan.

4.2.5.3 Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro

Sesuai dengan hasil analisis uji t, nilai t yang diperoleh adalah -0,015, yang lebih kecil dari angka t tabel sebesar 2,20099 pada tingkat signifikansi 0,989, yang lebih besar dari 0,05. Temuan ini menyiratkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi (X3) tidak memiliki dampak terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro. Baik peningkatan maupun penurunan pertumbuhan ekonomi tidak memiliki hubungan langsung dengan fluktuasi tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi tidak serta-merta berarti pengurangan kemiskinan, begitu pula halnya sebaliknya. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak selalu dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Pertumbuhan

mungkin lebih terfokus pada bagian-bagian tertentu atau kelompok tertentu, sehingga dampaknya bagi masyarakat yang kurang mampu masih minim. Secara sederhana, laju pertumbuhan yang tinggi tidak selalu menunjukkan peningkatan kesejahteraan bagi mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa angka pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup untuk mengatasi masalah kemiskinan. Diperlukan pertumbuhan ekonomi yang lebih menyeluruh, yang mampu menghasilkan pekerjaan, meningkatkan pendapatan individu berpenghasilan rendah, serta memperluas akses terhadap kesempatan ekonomi.

Temuan ini tidak selaras dengan teori Todaro, pertumbuhan ekonomi adalah proses berkelanjutan meningkatkan kapasitas produktif suatu perekonomian sehingga pendapatan dan output nasional terus bertambah, yang pada akhirnya diharapkan dapat menekan kemiskinan. Secara teori, ketika ekonomi tumbuh, kesempatan kerja meningkat, pendapatan naik, dan kesejahteraan masyarakat pun membaik. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks Kabupaten Bojonegoro, pertumbuhan yang terjadi belum terbukti mampu menurunkan kemiskinan secara signifikan. Dengan demikian, temuan ini belum sepenuhnya sejalan dengan pandangan Todaro. Kemungkinan besar, perkembangan ekonomi yang terjadi saat ini tidak bersifat inklusif dan belum mencakup sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga kerja dari komunitas miskin. Dengan kata lain, untuk memastikan pertumbuhan dapat mengurangi kemiskinan seperti yang dinyatakan oleh Todaro, dibutuhkan sebuah kebijakan yang memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan dapat dinikmati secara lebih adil dan berkelanjutan oleh seluruh kelompok masyarakat.

Temuan ini didukung oleh (Dianti et al., 2024) yang menyatakan bahwa faktor pertumbuhan ekonomi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur pada periode 2010 hingga 2019. Pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi dengan distribusi pendapatan yang merata tidaklah cukup untuk mengatasi masalah kemiskinan, karena hasil dari pertumbuhan tersebut tidak selalu dirasakan secara setara oleh semua lapisan masyarakat.

4.3 Hasil Pengujian Kabupaten Tuban

4.3.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4. 14 Hasil Uji Regresi Linier Berganda Kab. Tuban

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	50,358	11,045		4,560	0,004
Ketimpangan Pendapatan	7,706	9,202	0,287	0,837	0,434
Indeks Pembangunan Manusia	-0,543	0,188	-1,070	-2,882	0,028
Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	-0,052	0,079	-0,187	-0,658	0,535

Sumber: Lampiran

Hasil analisis dengan model OLS menghasilkan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

Tingkat Kemiskinan = 50,358 + 7,706 Ketimpangan Pendapatan – 0,543 Indeks Pembangunan Manusia - 0,052

Sesuai dengan rumus regresi linear berganda yang telah disebutkan, penjelasan berikut dapat diberikan:

1. $\alpha = \text{Konstanta} = 50,358$

Nilai Konstanta 50,358 memiliki arti jika Ketimpangan Pendapatan, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi tetap tidak berubah, maka Tingkat Kemiskinan bernilai 50,358

2. $B1 = \text{Koefisien Regresi Ketimpangan Pendapatan} = 7,706$

Menurut nilai koefisiensi regresi dengan variabel Ketimpangan Pendapatan, Ketimpangan Pendapatan berkorelasi positif dengan Tingkat Kemiskinan, yaitu untuk setiap kenaikan satu persen dalam Tingkat Kemiskinan, Ketimpangan Pendapatan akan bertambah sebesar 7,706

3. $B2 = \text{Koefisien Regresi Indeks Pembangunan Manusia} = -0,543$

Menurut nilai koefisiensi regresi dengan variabel Indeks Pembangunan Manusia, IPM memiliki hubungan negatif dengan Tingkat Kemiskinan, di mana setiap peningkatan satu persen dalam Tingkat Kemiskinan akan menurunkan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 0,543

4. $B3 = \text{Koefisien Regresi Tingkat Pertumbuhan Ekonomi} = -0,052$

Menurut nilai koefisiensi regresi dengan variabel Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, TPE memiliki hubungan positif dengan Tingkat Kemiskinan, di mana setiap peningkatan satu persen dalam Tingkat Kemiskinan akan menurunkan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,052.

4.3.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4. 15 Hasil Uji Koefisiensi Determinasi (R^2) Kab. Tuban

R	R Square
0,809	0,654

Sumber: Lampiran

Tabel 4. 15 memperlihatkan bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) mencapai angka 0,654. Angka ini mengindikasikan bahwa sekitar 65,4% perubahan dalam Tingkat Kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen yang telah dianalisis dalam penelitian ini. Di sini, sebagian besar perubahan tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang telah diteliti. Sementara itu, 34,6% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

4.3.3 Hasil Uji Asumsi Klasik (BLUE)

Tujuan dari menguji asumsi-asumsi klasik adalah memastikan bahwa model regresi yang diperoleh benar-benar akurat, dapat dipercaya, bebas dari kecenderungan bias, serta konsisten dalam menggambarkan hubungan antar variabel (Ghozali, 2016). Sebuah model regresi linier dianggap baik dan dapat diandalkan jika memenuhi asumsi-asumsi dasar, seperti residual yang terdistribusi normal dan tidak ada masalah multikolinearitas, autokorelasi, serta heteroskedastisitas.

4.3.3.1 Uji Normalitas

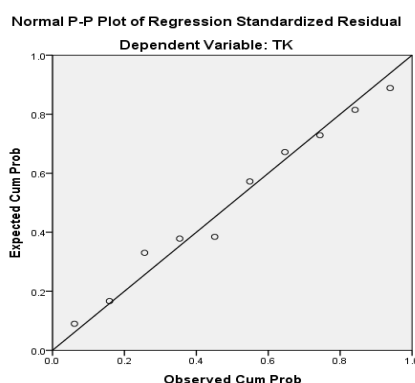
Tabel 4. 16 Hasil Uji Normalitas Kab. Tuban

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
	Unstandardized Residual
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,200

Sumber: Lampiran

Residual dapat dianggap mengikuti distribusi normal jika nilai signifikansi yang diperoleh lebih dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa data tidak mengalami penyimpangan signifikan dari distribusi normal. Statistik signifikansi yang ditunjukkan dalam tabel 4.7, adalah 0,200 yang diperoleh dari pengujian

Kolmogorov Smirnov. Nilai ini melebihi 0,05 yang menandakan bahwa variabel bebas dan terikat terdistribusi dengan baik.



Gambar 4. 6 Hasil Grafik Normal P-P (Probability Plot) Kab. Tuban
Sumber: Peneliti

4.3.3.2 Uji Multikolinearitas

Tabel 4. 17 Hasil Uji Multikolinearitas Kab. Tuban

	Tolerance	VIF
Ketimpangan Pendapatan	0,492	2,032
Indeks Pembangunan Manusia	0,418	2,390
Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	0,713	1,402

Sumber: Lampiran

Berdasarkan hasil pengujian yang ditampilkan dalam Tabel 4.17, nilai VIF untuk X1 (Ketimpangan Pendapatan) sebesar 2,032 X2 (Indeks Pembangunan Manusia) sebesar 2,390, dan X3 (Tingkat Pertumbuhan Ekonomi) sebesar 1,402. Karena setiap nilai VIF kurang dari 10, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas. Nilai Tolerance yang diperoleh untuk setiap variabel adalah X1 = 0,492, X2 = 0,418, dan X3 = 0,713, yang seluruhnya masih <1. Model regresi yang diterapkan dapat dianggap tidak terdapat gejala multikolinearitas.

4.3.3.3 Uji Autokorelasi

Berikut temuan uji Durbin-Watson (DW) untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi:

1. Nilai Durbin-Watson = 1,495
2. Jumlah Variabel Bebas (k) = 3
3. Jumlah Sampel (n) = 10
4. Taraf Signifikansi = 0,05
5. $dL = 0,5253$; $dU = 2,0163$; $4-dU = 1,9837$

Tabel 4. 18 Hasil Uji Autokorelasi Kab. Tuban

Durbin Watson	Hasil Pengujian	Keterangan
1,523	$dL < \text{Durbin-Watson} < dU$ $0,5253 < 1,495 < 2,0163$	Tidak Ada Kesimpulan

Sumber: Lampiran

Dari hasil pengujian yang dilakukan nilai dari Durbin-Watson (DW) yaitu sebesar 1,495. Angka berada didaerah tidak ada kesimpulan, artinya autokorelasi itu terjadi atau tidak. Apabila uji autokorelasi hasilnya tidak dapat disimpulkan, maka menggunakan uji runs test untuk mengetahui terjadi autokorelasi atau tidak.

Tabel 4. 19 Hasil Uji Runs Test Kab. Tuban

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,737

Sumber: Lampiran

Pada hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai asymptotic significant, yaitu uji runs test sebesar 0,737 ($> 0,05$) maka tidak terjadi autokorelasi.

4.3.3.4 Uji Heteroskedastisitas

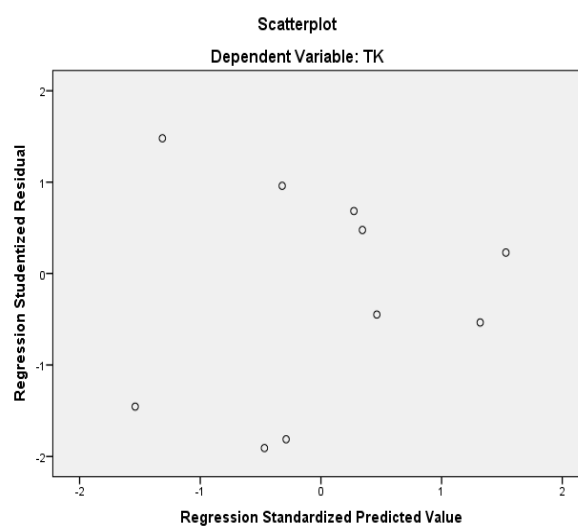
Tabel 4. 20 Hasil Uji Heteroskedastisitas Kab. Tuban

	Sig.
Ketimpangan Pendapatan	0,038
Indeks Pembangunan Manusia	0,003

	Sig.
Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	0,001

Sumber: Lampiran

Berdasarkan Tabel 4.20, nilai signifikansi yang diperoleh di bawah batas 0,05 ($<0,05$), bisa disimpulkan model penelitian menunjukkan adanya gejala heteroskedastisitas. Apabila tanda-tanda tersebut terlihat, maka metode lain bisa diterapkan, contohnya analisis dengan menggunakan grafik scatterplot.



Gambar 4. 7 Grafik Scatterplot

Sumber: Peneliti

Grafik ini menunjukkan tidak adanya pola yang jelas, karena titik-titik terdistribusi secara acak baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa heteroskedastisitas tidak terjadi. Hasil ini menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara nilai residual dan variabel-variabel yang dianalisis. Oleh karena itu, persamaan regresi bisa dianggap telah memenuhi asumsi klasik dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

4.3.4 Hasil Uji Hipotesis

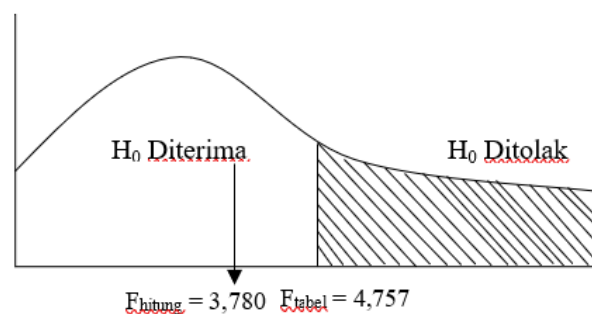
4.3.4.1 Uji F

Tabel 4. 21 Hasil Uji F Kab. Tuban

F Statistic	3,780
Sig	0,078

Sumber: Lampiran

Berdasarkan kajian yang terdapat pada Tabel 4. 21, nilai F yang diperoleh adalah 3,780 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,078. Jika dibandingkan dengan nilai F tabel yang mencapai 4,757, yang dihitung dengan $df_1 = 3$ (jumlah variabel X) dan $df_2 = 10$ ($n-k-1$ atau $10-3-1$), terlihat bahwa nilai F yang dihitung lebih kecil dari F tabel. Selain itu, diketahui bahwa nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,078 ($>0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama tidak memberikan dampak signifikan terhadap variabel dependen. Berikut adalah kurva distribusi F untuk Kabupaten Tuban:



Gambar 4. 8 Kurva Distribusi F Kabupaten Tuban

4.2.4.2 Uji T

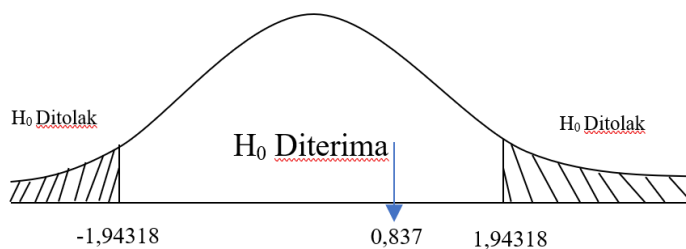
Tabel 4. 22 Hasil Uji T Kab. Tuban

Model	T	Sig.
Ketimpangan Pendapatan	0,837	0,434
Indeks Pembangunan Manusia	-2,882	0,028
Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	-0,658	0,535

Sumber: Lampiran

a. Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan penelitian dengan menggunakan uji t, diperoleh nilai t hitung untuk ketidaksamaan pendapatan adalah 0,837. Di sisi lain, t tabel dengan tingkat signifikansi ($\alpha/2 = 0,05$) dan derajat kebebasan (df) yang dihitung adalah $(10-3-1) = 6$, yaitu 1,94318. Karena t hitung (0,837) lebih kecil daripada t tabel (1,94318), maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak. Selain itu, nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,434, yang kurang dari 0,05. Kurva distribusi t untuk ketimpangan pendapatan di Kabupaten Tuban disajikan di bawah ini:



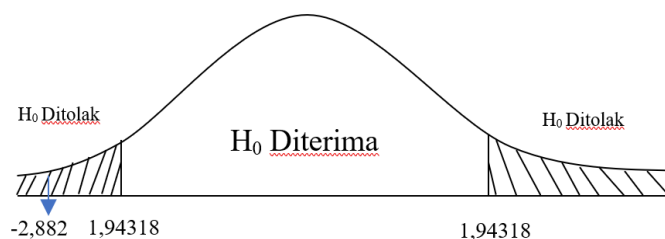
Gambar 4. 9 Kurva Distribusi Uji t Ketimpangan Pendapatan (X1) Kab. Tuban

Karena grafik distribusi t menunjukkan bahwa angka tersebut berada di zona penerimaan H_0 , maka bisa disimpulkan bahwa variabel Ketimpangan Pendapatan (X1) secara parsial tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Tuban.

b. Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan pengujian t, diperoleh nilai t yang dihitung untuk indeks pembangunan manusia sebesar -2,882. Sementara itu, nilai t tabel pada tingkat signifikan ($\alpha/2 = 0,05$) dan derajat kebebasan (df) yang dihitung dari $(10-3-1) = 6$ adalah 1,94318. Mengingat t yang dihitung (-2,882) lebih besar daripada t tabel (1,94318), dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Selain itu, nilai

signifikan yang diperoleh adalah 0,028, yang berada di bawah 0,05. Kurva distribusi t untuk ketimpangan pendapatan di Kabupaten Tuban dapat dilihat di bawah ini:

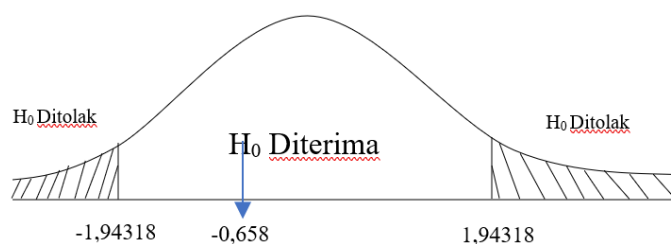


Gambar 4. 10 Kurva Distribusi Uji t Indeks Pembangunan Manusia (X2) Kab. Tuban

Karena kurva distribusi t menunjukkan bahwa nilai tersebut terletak di zona penolakan H_0 , maka bisa disimpulkan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia (X2) berdampak negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Tuban secara parsial.

c. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, nilai t yang diperoleh untuk pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar -0,658. Sementara itu, nilai t tabel pada tingkat signifikansi ($\alpha/2 = 0,05$) dengan derajat kebebasan (df) yang dihitung sebagai $(10-3-1) = 6$ adalah 1,94318. Dengan memperhatikan bahwa t hitung (-0,658) lebih kecil daripada t tabel (1,94318), maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak. Selain itu, nilai signifikansi yang didapatkan adalah 0,535, yang lebih tinggi daripada 0,05. Kurva distribusi t untuk tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tuban ditampilkan berikut ini.:



Gambar 4. 11 Kurva Distribusi Uji t Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (X3) Kab. Tuban

Karena kurva distribusi t menunjukkan bahwa nilai itu terletak di zona penerimaan H_0 , maka bisa dikatakan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi (X3) tidak berpengaruh secara parsial terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Tuban.

4.3.5 Pembahasan

Menurut analisis data yang telah dilakukan, hubungan antara Ketimpangan Pendapatan, Indeks Pembangunan Manusia, dan Pertumbuhan Ekonomi mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Tuban dari tahun 2012 hingga 2021. Selain itu, analisis t secara individual menunjukkan bahwa setiap variabel independen memberikan pengaruh yang berbeda terhadap variabel dependen, dan pengaruh tersebut terbukti signifikan secara statistik.

4.3.5.1 Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Tuban

Berdasarkan kajian dengan menerapkan uji t, nilai t yang diperoleh adalah 0,837, yang lebih kecil daripada nilai t yang tertera di tabel yang mencapai 2,20099 dengan tingkat signifikansi 0,434 yang lebih tinggi dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa Ketimpangan Pendapatan (X1) tidak memiliki dampak terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Tuban. Ini menunjukkan bahwa perubahan di ketimpangan pendapatan tidak disertai dengan perubahan di tingkat kemiskinan di Kabupaten Tuban. Tinggi atau rendahnya ketimpangan pendapatan

tidak secara langsung menyebabkan naik atau turunnya tingkat kemiskinan. Ketika ketimpangan meningkat, kemiskinan tidak ikut meningkat. Temuan ini menjelaskan bahwa hubungan ketimpangan pendapatan dan kemiskinan di Kabupaten Tuban tidak terjadi secara langsung. Faktor lain yang lebih dominan memengaruhi kemiskinan, seperti kesempatan kerja, kualitas pendidikan, struktur ekonomi daerah, atau kebijakan sosial yang berlaku. Oleh karena itu, kendati distribusi pendapatan tidak merata, situasi ini belum tentu berpengaruh langsung pada angka penduduk yang hidup dalam kemiskinan. Secara umum, temuan ini menunjukkan bahwa masalah kemiskinan memiliki aspek yang rumit. Ketimpangan memang sering dianggap sebagai pemicu kemiskinan, namun dalam konteks ini, pengaruhnya tidak terbukti secara statistik. upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tuban tidak cukup hanya dengan mempersempit jarak pendapatan, tetapi juga perlu menyentuh aspek lain yang lebih langsung dirasakan masyarakat.

Temuan ini tidak sesuai dengan teori Simon Kuznets, temuan penelitian ini memperlihatkan tidak adanya pengaruh signifikan antara ketimpangan dan kemiskinan berarti hubungan yang digambarkan Kuznets tidak tampak secara langsung dalam periode penelitian ini. Kabupaten Tuban berada pada fase pembangunan tertentu di mana perubahan ketimpangan belum cukup kuat memengaruhi tingkat kemiskinan, atau terdapat faktor lain yang lebih menentukan. Dengan demikian, hasil ini tidak sepenuhnya bertentangan dengan teori Kuznets, tetapi menunjukkan bahwa dinamika di tingkat daerah bisa berbeda dan lebih kompleks dibandingkan gambaran teoritis secara umum.

Temuan ini sesuai dengan penelitian (Dianti et al., 2024) yang menyebutkan bahwa ketidaksamaan dalam penghasilan tidak berpengaruh signifikan pada angka

kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan masih jauh dari ideal dan ada ketidakadilan, terutama di wilayah yang belum sepenuhnya berkembang.

4.3.5.2 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Tuban

Berdasarkan analisis uji t yang dilakukan, diperoleh nilai t yang dihitung mencapai -2,882, yang lebih besar dibandingkan nilai t pada tabel yang tercatat 2,20099 dengan tingkat signifikansi $0,028 < 0,05$. Temuan ini menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (X2) berdampak negatif dan signifikan dengan besar pengaruh sebesar 0,771% terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Tuban. Apabila IPM tinggi, maka tingkat kemiskinan semakin rendah, begitupun sebaliknya. Hubungan tersebut memperlihatkan bahwa kualitas pengembangan manusia memiliki peran nyata dalam menentukan kesejahteraan masyarakat. Ketika akses pendidikan semakin baik, layanan kesehatan semakin memadai, dan daya beli masyarakat meningkat, peluang untuk keluar dari kemiskinan juga semakin besar. Masyarakat sehat dan berpendidikan memiliki kemampuan semakin baik untuk bekerja dengan produktif, memperoleh pendapatan yang layak, dan meningkatkan taraf hidupnya. Oleh sebab itu, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia merupakan faktor kunci dalam menurunkan angka kemiskinan. Penelitian ini juga mengindikasikan bahwa kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan pendapatan yang rendah, melainkan juga sangat terkait dengan kualitas sumber daya manusia. Saat pembangunan manusia diperkuat, dampaknya dapat dirasakan secara langsung dalam pengurangan jumlah individu yang hidup dalam keadaan miskin.

Hasil ini konsisten dengan teori Modal Manusia yang dikemukakan oleh Mankiw, yang menunjukkan bahwa pendidikan dan keahlian adalah faktor kunci untuk meningkatkan produktivitas di tempat kerja. Saat masyarakat mempunyai pengetahuan dan kemampuan yang unggul, mereka lebih mampu menyerap teknologi, beradaptasi dengan perubahan ekonomi, serta menciptakan nilai tambah dalam aktivitas produksi. Pada akhirnya, peningkatan produktivitas ini turut mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas dan berkelanjutan, sehingga angka kemiskinan dapat ditekan secara nyata dan berangsur-angsur.

Hasil ini sejalan dengan temuan oleh (Winata & Musthofa, 2024) yang mengungkapkan bahwa terdapat hubungan terbalik antara IPM dan angka kemiskinan, di mana setiap kali IPM meningkat, angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur cenderung menurun.

4.3.5.3 Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Tuban

Hasil dari penelusuran t menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Tuban. Ketika ekonomi meningkat, kemiskinan tidak otomatis berkurang begitupun sebaliknya. Hubungan keduanya dalam penelitian ini terlihat lemah dan tidak menunjukkan pengaruh secara parsial. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa perkembangan ekonomi yang terjadi belum tentu secara langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi bisa jadi hanya terpusat pada sektor atau kelompok tertentu, sehingga manfaatnya belum tersebar merata dan dampaknya terhadap penurunan kemiskinan masih terbatas. Angka pertumbuhan yang tinggi belum tentu mencerminkan pemerataan

kesejahteraan. Lebih dalam lagi, temuan ini mengindikasikan bahwa kemiskinan merupakan isu yang rumit dan tidak hanya dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi saja. Diperlukan kemajuan ekonomi yang tidak hanya pesat, tetapi juga berkelas dan merangkul seluruh lapisan masyarakat, yang dapat menciptakan pekerjaan, meningkatkan penghasilan masyarakat kecil, serta memperluas akses terhadap kesempatan ekonomi, sehingga keuntungan dari hal ini benar-benar dirasakan dalam usaha mengurangi kemiskinan.

Temuan ini tidak sesuai dengan teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh Todaro, dimana pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai proses yang berkesinambungan yang meningkatkan kemampuan produktif perekonomian, sehingga pendapatan nasional terus mengalami peningkatan dan pada gilirannya dapat mengurangi kemiskinan. Namun, hasil temuan ini memperlihatkan bahwa di Kabupaten Tuban, pertumbuhan yang terjadi belum sepenuhnya efektif dalam menekan kemiskinan secara nyata. Oleh karena itu, pertumbuhan tersebut perlu ditujukan supaya lebih menyeluruh dan mendukung kepada masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga manfaatnya bisa dirasakan lebih merata dan berkelanjutan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dianti et al., 2024) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur selama tahun 2010 hingga 2019. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada pertumbuhan ekonomi, hal itu tidak cukup untuk menekan angka kemiskinan jika tidak diimbangi dengan distribusi pendapatan yang adil, karena keuntungan yang diperoleh tidak selalu dirasakan secara merata oleh semua lapisan masyarakat.

4.3.6 Perbandingan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban menunjukkan karakteristik yang berbeda dalam hubungan antara ketimpangan pendapatan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan. Meskipun kedua daerah berada dalam wilayah geografis yang berdekatan dan sama-sama termasuk kawasan strategis di Jawa Timur bagian barat, struktur ekonomi dan dinamika pembangunan di kedua kabupaten memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Pada variabel ketimpangan pendapatan, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ketimpangan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan baik di Kabupaten Bojonegoro maupun Kabupaten Tuban. Namun demikian, kondisi ketimpangan di Kabupaten Tuban cenderung mengalami peningkatan yang lebih besar dibandingkan Kabupaten Bojonegoro. Kabupaten Tuban menunjukkan tren kenaikan indeks gini yang lebih progresif hingga mencapai angka 0,35 pada tahun 2021, sedangkan Kabupaten Bojonegoro relatif lebih stabil pada kisaran ketimpangan sedang. Kondisi ini menggambarkan bahwa distribusi hasil pembangunan di Kabupaten Tuban belum sepenuhnya merata, sehingga sebagian masyarakat belum memperoleh manfaat ekonomi secara optimal.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kedua kabupaten menunjukkan hasil yang sama, yaitu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Artinya, semakin tinggi kualitas pembangunan manusia, maka tingkat kemiskinan akan semakin menurun. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak mampu memperbesar peluang masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Kabupaten Bojonegoro menunjukkan perkembangan

IPM yang lebih cepat dibandingkan Kabupaten Tuban, terutama sejak tahun 2019 hingga 2021. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Bojonegoro berjalan lebih efektif dalam mendorong penurunan kemiskinan.

Pada variabel pertumbuhan ekonomi, hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kedua kabupaten. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya bersifat inklusif. Kabupaten Bojonegoro memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi pada periode tertentu akibat dominasi sektor pertambangan dan migas, bahkan sempat mencapai lebih dari 20 persen. Namun pertumbuhan tersebut bersifat fluktuatif dan belum sepenuhnya mampu menurunkan kemiskinan secara signifikan. Di sisi lain, Kabupaten Tuban memiliki pola pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil karena ditopang oleh sektor industri pengolahan dan sektor lainnya yang lebih beragam, meskipun tingkat pertumbuhannya tidak setinggi Bojonegoro. Dari hasil tersebut dapat dipahami bahwa keberhasilan penurunan kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh tingginya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kualitas pembangunan manusia dan pemerataan hasil pembangunan. Kabupaten Bojonegoro cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menurunkan kemiskinan secara konsisten dibandingkan Kabupaten Tuban. Namun demikian, kedua daerah masih menghadapi tantangan besar dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.